



ANALISIS PERAN INDOKTRINASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL DAN MEDIA DIGITAL

Putra Kaslin Hutabarat ^{1*}, Intan Mai Yusufika ², Kania Dwi Cahyani ³, Elen Meilani ⁴, Irfan Syahputra ⁵, Rahmat Alfatin ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

Corresponding Author: putrakaslin@usk.ac.id *

Article Info

Article history:

Received : 29 Maret 2026

Acceptance : 30 April 2026

Published : 30 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Hutabarat, K. P., Yusufika, M. I., Cahyani, D. K., Meilani, E., Syahputra, I., Alfatin, R. (2026). ANALISIS PERAN INDOKTRINASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL DAN MEDIA DIGITAL. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 171-183.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji dinamika dan peran indoktrinasi dalam ranah pendidikan politik, khususnya dalam konteks pendidikan formal dan media digital di Indonesia. Penelitian ini bertolak dari keprihatinan atas praktik pendidikan politik yang kerap kehilangan karakter kritisnya dan bergeser menjadi alat penanaman ideologi secara sepihak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menganalisis bagaimana proses indoktrinasi dilakukan dalam sistem pendidikan, peran media massa dan media sosial sebagai agen indoktrinasi modern, serta dampaknya terhadap pembentukan identitas politik, nilai, dan perilaku peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa indoktrinasi memiliki potensi besar dalam membentuk kesetiaan ideologis tanpa ruang bagi nalar kritis, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Meski demikian, resistensi terhadap indoktrinasi tetap dimungkinkan melalui penguatan kapasitas berpikir kritis, akses informasi yang beragam, dan lingkungan sosial yang inklusif. Artikel ini merekomendasikan perlunya pembaruan paradigma pendidikan politik yang lebih demokratis dan reflektif, guna menumbuhkan warga negara yang cakap dan berpandangan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Indoktrinasi, Identitas Politik.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran warga negara terhadap hak, kewajiban, dan peran mereka dalam sistem demokrasi. Dalam idealnya, pendidikan politik seharusnya menjadi wahana untuk mengembangkan daya kritis, sikap inklusif, dan kemampuan partisipatif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Suhendar et al., 2026; Taufika et al., 2026). Namun, dalam praktiknya, pendidikan politik tidak jarang berubah menjadi alat indoktrinasi ideologis, yakni suatu proses

penanaman nilai dan keyakinan tertentu secara sepihak tanpa memberikan ruang untuk berpikir kritis (Suhendar, Taufika, et al., 2023; Zembylas, 2022).

Indoktrinasi dalam konteks pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang dilakukan untuk membentuk pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang agar sesuai dengan ideologi tertentu, yang kerap disampaikan tanpa membuka ruang untuk dialog dan perbedaan pendapat (Hutabarat et al., 2024). Dalam sejarah Indonesia, praktik indoktrinasi ini sangat nyata, seperti pada masa Orde Lama dengan penerapan ideologi Manipol-USDEK, serta pada masa Orde Baru yang menekankan pelajaran moral Pancasila secara tunggal dan non-kritis (Saragih et al., 2025; Suprayogi et al., 2024). Upaya ini bertujuan menciptakan warga negara yang loyal terhadap negara, tetapi sering kali mengorbankan kebebasan berpikir peserta didik. Kemajuan teknologi informasi memperluas dimensi indoktrinasi politik, dengan media massa dan media sosial menjadi instrumen penyebaran narasi ideologis yang cepat dan luas. Dalam konteks ini, indoktrinasi tidak hanya terjadi dalam ruang kelas formal, tetapi juga dalam ruang publik digital yang sarat dengan disinformasi, framing berita, dan agenda politik tertentu (Neundorf et al., 2024; Rea, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana praktik indoktrinasi dalam pendidikan politik dapat mempengaruhi pembentukan identitas politik, nilai, dan perilaku siswa. Lebih dari itu, penting pula mengeksplorasi bagaimana sikap resistensi dapat muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan, terutama melalui penguatan literasi politik dan daya kritis dalam masyarakat. Indoktrinasi dalam pendidikan politik merujuk pada proses sistematis yang dilakukan oleh rezim atau institusi untuk menyelaraskan nilai-nilai dan pandangan politik warga negara dengan ideologi yang dominan. Proses ini sering kali dilakukan melalui pendidikan formal dan media massa, dengan tujuan membentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap rezim yang berkuasa.

Neundorf et al. (2024) dalam studi mereka "Varieties of Indoctrination: The Politicization of Education and the Media around the World" menekankan bahwa indoktrinasi adalah proses sosialisasi yang dipimpin oleh rezim untuk meningkatkan kesesuaian antara pandangan dan prinsip rezim dengan warga negaranya. Mereka mengembangkan dan memvalidasi dataset V-Indoc yang mencakup 160 negara dari tahun 1945 hingga sekarang, yang memungkinkan analisis empiris baru tentang penyebab dan konsekuensi indoktrinasi. Indoktrinasi merupakan proses sistematis dalam menyampaikan ajaran atau ideologi tertentu kepada individu dengan tujuan membentuk kesetiaan dan kepatuhan yang bersifat mutlak. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *indoctrinare*, yang berarti 'mengajarkan ke dalam', dan berkembang menjadi konotasi negatif ketika dikaitkan dengan pembatasan terhadap pemikiran kritis (Snook, 2024).

Dalam konteks ini, indoktrinasi tidak terbatas pada rezim otoriter saja, tetapi juga dapat terjadi dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol narasi politik, terlepas dari jenis rezim yang berkuasa. Selain itu, studi oleh Dong & Dong (2023) dalam "Authoritarian Recursions: How Fiction, History, and AI Reinforce Control in Education, Warfare, and Discourse" menunjukkan bahwa integrasi teknologi, seperti kecerdasan

buatan, dalam sistem pendidikan dapat memperkuat kontrol ideologis dan mengurangi otonomi intelektual peserta didik. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mencegah potensi indoktrinasi. Dalam konteks pendidikan politik, indoktrinasi sering dipandang sebagai strategi non-kekerasan yang digunakan oleh negara atau kelompok tertentu untuk memastikan kepatuhan ideologis masyarakat, terutama melalui sistem pendidikan (Khan, 2026; Tetteh & Edgell, 2026). Proses ini mencakup pembatasan akses terhadap perspektif alternatif dan menekankan satu sudut pandang politik sebagai satu-satunya kebenaran yang sah. Di Indonesia, praktik ini telah berakar sejak masa kolonial melalui politik etis, dan semakin berkembang pada masa Orde Lama dan Orde Baru melalui penyusunan kurikulum ideologis seperti Manipol-USDEK dan penataran P4 (Fauzi et al., 2024; Khaeruddin, 2024). Tujuan utama dari proses indoktrinasi ini adalah menciptakan warga negara yang loyal terhadap rezim yang berkuasa dan membentuk stabilitas ideologis dalam masyarakat.

Pendidikan dalam pengertian luas adalah proses pengembangan potensi individu secara sadar dan sistematis. Fungsi utama pendidikan meliputi pembentukan karakter, peningkatan kapasitas intelektual, dan penanaman nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat (Suhendar & Saragih, 2025; Utamirohmahsari, 2024). Dalam konteks politik, pendidikan berperan sebagai media pembentukan kesadaran politik dan identitas kewarganegaraan. Namun, ketika pendidikan dijadikan alat untuk menyebarkan satu ideologi tertentu tanpa memberi ruang bagi pemikiran kritis dan keberagaman pandangan, maka ia berpotensi menjadi sarana indoktrinasi. Hal ini dapat menyebabkan homogenisasi pola pikir dan menghambat terbentuknya masyarakat yang pluralis dan demokratis.

Politik, sebagaimana didefinisikan oleh Aristoteles, adalah seni mengatur masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*). Dalam pandangan modern, politik mencakup pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, serta pengelolaan konflik dan sumber daya dalam masyarakat (Dai et al., 2025; Patonia, 2025). Tujuan pendidikan politik dalam sistem demokrasi adalah untuk menciptakan warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, mampu berpikir kritis, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan yang baik harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai pandangan politik dan tidak sekadar menjadi alat penguasa dalam membentuk kesetiaan ideologis (Zhao & Zhang, 2025).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena indoktrinasi dalam pendidikan politik, khususnya dalam konteks pendidikan formal dan peran media digital di Indonesia (Creswell, 2021). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang untuk memahami makna dan dinamika sosial-politik secara mendalam berdasarkan interpretasi terhadap data teks dan narasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap referensi yang mendukung analisis tentang indoktrinasi politik, baik dalam konteks historis (masa Orde Lama dan Orde Baru)

maupun kontemporer (era reformasi dan digital). Data sekunder yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema analitis seperti bentuk indoktrinasi, media indoktrinasi, dampaknya terhadap siswa, dan strategi resistensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indoktrinasi dalam Pendidikan Politik: Antara Edukasi dan Kontrol Ideologis

Indoktrinasi dalam pendidikan politik merupakan proses sistematis yang digunakan oleh rezim atau institusi untuk menyelaraskan nilai-nilai dan pandangan politik warga negara dengan ideologi yang dominan. Proses ini sering kali dilakukan melalui pendidikan formal dan media massa, dengan tujuan membentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap rezim yang berkuasa.

"Varieties of Indoctrination: The Politicization of Education and the Media around the World" menekankan bahwa indoktrinasi adalah proses sosialisasi yang dipimpin oleh rezim untuk meningkatkan kesesuaian antara pandangan dan prinsip rezim dengan warga negaranya. Mereka mengembangkan dan memvalidasi dataset V-Indoc yang mencakup 160 negara dari tahun 1945 hingga sekarang, yang memungkinkan analisis empiris baru tentang penyebab dan konsekuensi indoktrinasi (Neundorf et al., 2024). Dalam konteks ini, indoktrinasi tidak terbatas pada rezim otoriter saja, tetapi juga dapat terjadi dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol narasi politik, terlepas dari jenis rezim yang berkuasa.

Pendidikan politik pada dasarnya bertujuan untuk membekali individu dengan pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik yang efektif memfokuskan pada pemberian informasi yang objektif dan pengembangan pemikiran kritis, sehingga individu dapat membuat keputusan politik yang bijaksana. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan politik seharusnya bertujuan untuk mencerdaskan dan menguatkan kapasitas individu dalam berpikir secara rasional dan analitis (Sahi, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pendidikan politik sering kali terjebak dalam ranah indoktrinasi, yaitu proses penyebaran ideologi yang dikendalikan oleh kekuasaan politik tertentu. Indoktrinasi politik ini tidak memberikan ruang bagi pemikiran kritis atau perspektif alternatif. Sebaliknya, ia berfungsi untuk memperkuat kontrol ideologis dari kelompok dominan dengan cara memanipulasi pemahaman dan perilaku warga negara. Dalam konteks ini, pendidikan politik bukan lagi berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, tetapi lebih pada pematuhan terhadap sistem dan ideologi yang ada. Oleh karena itu, indoktrinasi dalam pendidikan politik seringkali disertai dengan penggunaan propaganda, penyensoran informasi, dan pembatasan kebebasan berpikir (Moilanen & Huttunen, 2025). Perbedaan mendasar antara edukasi dan indoktrinasi dalam pendidikan politik terletak pada tujuan dan cara penyampaiannya. Edukasi politik

berorientasi pada pembentukan individu yang sadar akan hak-haknya dan mampu berpartisipasi aktif dalam demokrasi, sementara indoktrinasi berorientasi pada pencapaian kepatuhan terhadap ideologi tertentu tanpa memberi kesempatan untuk mempertanyakan atau menganalisisnya secara kritis. Dalam pendidikan yang mengarah pada indoktrinasi, materi yang diajarkan lebih banyak bersifat sepihak dan mengabaikan kebebasan berpikir. Dalam hal ini, pendidikan politik digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo kekuasaan dengan membentuk persepsi dan perilaku politik yang sejalan dengan kepentingan elit (Jaraisy & Agbaria, 2026).

Indoktrinasi dalam pendidikan politik seringkali terjadi dalam masyarakat dengan sistem otoriter atau totaliter, di mana penguasa memiliki kendali penuh atas informasi dan cara-cara pendidikan. Dalam sistem semacam ini, pendidikan politik lebih banyak digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat legitimasi penguasa melalui mekanisme ideologis yang bersifat manipulatif. Sebagai contoh, rezim otoriter sering kali mengontrol kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan selaras dengan ideologi negara, dan membatasi atau bahkan melarang ajaran yang bertentangan dengan kekuasaan yang ada. Akibatnya, proses pendidikan politik tidak lagi berfungsi sebagai wahana pembelajaran yang bebas dan terbuka, melainkan sebagai alat pengawasan dan kontrol sosial (Habibah et al., 2025).

Perspektif Global, Peran Guru dan Tantangan Teknologi dalam Indoktrinasi Pendidikan Politik

Indoktrinasi dalam pendidikan politik bukan fenomena yang eksklusif terjadi di Indonesia. Negara-negara lain menunjukkan variasi dalam tingkat dan bentuk indoktrinasi. Di Korea Utara, pendidikan politik berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan absolut, dengan kurikulum yang sepenuhnya diarahkan untuk membentuk loyalitas mutlak terhadap rezim (Suhendar, Syam, et al., 2023; Zeffildaa, 2025). Sebaliknya, negara-negara Skandinavia seperti Finlandia menekankan pendidikan kewarganegaraan berbasis dialog, keberagaman, dan refleksi kritis atas kebijakan publik, yang justru memperkuat partisipasi dan kepercayaan publik dalam demokrasi (Kalev et al., 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa tingkat indoktrinasi sangat dipengaruhi oleh struktur politik dan kebebasan akademik yang dijamin oleh negara.

Guru memainkan peran sentral sebagai penghubung antara kebijakan kurikulum dan pengalaman belajar peserta didik. Namun, dalam konteks sistem pendidikan yang terpusat dan normatif, kebebasan pedagogis guru sering kali dibatasi. Hal ini berdampak pada kecenderungan guru untuk mereproduksi wacana dominan tanpa membangun ruang diskusi kritis di kelas. Di sisi lain, guru yang memiliki kesadaran pedagogis dan reflektif mampu membangun pendidikan politik yang membebaskan, dengan membuka ruang dialektika dan menumbuhkan keberanian siswa untuk mempertanyakan kekuasaan. Oleh karena itu, pelatihan guru yang berbasis pada pedagogi kritis perlu diperkuat agar mereka tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan ideologi negara.

Kemajuan teknologi informasi dan kecerdasan buatan membawa tantangan baru dalam praktik indoktrinasi. Algoritma media sosial yang berbasis preferensi pengguna berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias politik dan

menghambat keberagaman informasi (Ahmmad et al., 2025). Selain itu, sistem pembelajaran berbasis AI yang tidak transparan dalam pengelolaan data dan kurikulum dapat digunakan untuk mengarahkan opini politik secara halus dan sistematis (Acar et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi pengambil kebijakan pendidikan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika, akuntabilitas, dan literasi digital dalam penggunaan teknologi di ruang kelas, agar AI berperan sebagai alat emansipasi, bukan kontrol ideologis.

Refleksi Kurikulum Politik Indonesia: Dari Manipol-USDEK ke Era Digital

Sejarah pendidikan politik di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan ideologis penguasa. Pada masa Orde Lama, pendidikan politik sangat dipengaruhi oleh ideologi presiden saat itu, yakni Manipol-USDEK (Manifesto Politik - UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Ideologi ini secara sistematis diinternalisasikan dalam sistem pendidikan melalui pelajaran-pelajaran kewarganegaraan dan forum-forum politik di sekolah, yang menekankan kesetiaan terhadap pemimpin dan arah politik negara. Pendidikan dijadikan alat pembentukan loyalitas ideologis dan bukan pengembangan nalar kritis warga negara (Leś, 2024).

Memasuki masa Orde Baru, arah kurikulum pendidikan politik berubah namun tetap berada dalam bingkai kontrol negara. Rezim Soeharto menggantikan Manipol-USDEK dengan pendekatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Program ini mewajibkan siswa dan masyarakat untuk mengikuti penataran ideologi yang disusun secara monolitik, menolak keragaman tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila. Kurikulum yang diterapkan di sekolah saat itu menekankan kepatuhan, stabilitas, dan antikritik terhadap pemerintah. Upaya ini sejalan dengan prinsip sentralisasi pendidikan dan pembungkaman wacana alternatif, yang merupakan karakteristik pendidikan politik otoriter (Weigele & Brandt, 2022).

Reformasi 1998 menandai perubahan besar dalam struktur politik Indonesia, termasuk dalam sistem pendidikan. Kurikulum mulai didesentralisasi dan keterbukaan informasi mulai diakomodasi. Namun, reformasi ini belum sepenuhnya mampu menghapus praktik indoktrinatif dalam pendidikan politik. Kurikulum masih sering kali menampilkan narasi sejarah versi negara dan mengabaikan perspektif minoritas atau oposisi politik. Upaya untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang demokratis juga belum konsisten, dan sering terhambat oleh pergantian kebijakan yang bersifat politis dan pragmatis (Suhendar et al., 2024).

Di era digital, kurikulum pendidikan politik menghadapi tantangan baru. Arus informasi yang sangat cepat dan tidak terbatas memperluas sumber pembelajaran di luar ruang kelas. Di satu sisi, ini membuka ruang bagi literasi politik yang lebih luas dan inklusif. Namun di sisi lain, minimnya kemampuan literasi digital dan rendahnya budaya berpikir kritis membuat generasi muda rentan terhadap indoktrinasi baru melalui media sosial dan algoritma digital. Kurikulum sekolah masih cenderung belum responsif terhadap realitas ini, dan lebih banyak terfokus pada hafalan ketimbang pemahaman substantif atas isu-isu politik kontemporer (Baihaki, 2025).

Untuk menjawab tantangan zaman, diperlukan reformulasi kurikulum pendidikan politik yang menekankan pada pengembangan pemikiran reflektif, keberagaman pandangan politik, dan partisipasi aktif siswa dalam praktik demokrasi. Kurikulum harus mampu mengakomodasi perspektif lintas ideologi, sejarah kritis, serta membekali siswa dengan kemampuan menilai informasi politik secara objektif. Selain itu, integrasi teknologi digital ke dalam kurikulum harus didesain secara etis dan akuntabel, agar tidak menjadi alat baru indoktrinasi, melainkan wahana pembebasan intelektual.

Indoktrinasi Pendidikan Politik dalam Era Media Sosial dan Demokrasi Digital

Perkembangan media sosial dan platform digital telah mengubah secara fundamental cara indoktrinasi pendidikan politik dilakukan di era kontemporer. Berbeda dengan era-era sebelumnya di mana indoktrinasi dilakukan secara terpusat melalui kurikulum dan media massa yang dikontrol ketat, era digital memungkinkan proliferasi sumber-sumber informasi politik yang lebih beragam namun juga lebih sulit dikontrol. Fenomena ini menciptakan paradoks dalam pendidikan politik: di satu sisi, masyarakat khususnya generasi muda memiliki akses yang lebih luas terhadap perspektif politik yang beragam; di sisi lain, algoritma media sosial yang berbasis preferensi cenderung menciptakan ruang gema (*echo chamber*) yang justru mempersempit wawasan politik mereka (Noviana, 2026; Rustandi et al., 2024). Polarisasi opini dalam media sosial menjadi tantangan baru bagi pendidikan politik yang emansipatoris, karena seringkali membuat pengguna terjebak dalam lingkaran informasi yang hanya mengonfirmasi bias politik yang sudah ada sebelumnya (Suhendar et al., 2023).

Indoktrinasi politik dalam platform digital seringkali bersifat lebih halus dan tidak mudah dideteksi dibandingkan dengan bentuk-bentuk tradisionalnya. Narasi politik disampaikan melalui konten yang tampak netral atau bahkan menghibur, seperti meme, video pendek, atau infografis yang tersebar luas di berbagai platform. Strategi komunikasi politik yang diadaptasi untuk era digital ini memanfaatkan emosi dan identitas sebagai penggerak utama keterlibatan pengguna (*user engagement*), yang pada gilirannya membuat proses indoktrinasi menjadi lebih personal dan efektif (Mahardika et al., 2025). Dampaknya terutama signifikan pada kelompok remaja dan dewasa muda yang masih dalam proses pembentukan identitas politik, karena kelompok ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di platform digital dan cenderung lebih rentan terhadap manipulasi informasi.

Dalam konteks ini, fenomena *algorithmic governance* menjadi perhatian khusus dalam studi indoktrinasi politik kontemporer. Sistem rekomendasi berbasis algoritma yang digunakan oleh platform media sosial tidak hanya mempengaruhi informasi apa yang dilihat oleh pengguna, tetapi juga secara tidak langsung membentuk pemahaman dan preferensi politik mereka melalui proses eksposur selektif (Diharsono & Mihardja, 2026). Berbeda dengan indoktrinasi tradisional yang mengandalkan otoritas terpusat, indoktrinasi algoritmik berlangsung melalui personalisasi konten yang mengarah pada fragmentasi publik menjadi kelompok-kelompok kecil dengan pandangan politik yang homogen dan seringkali ekstrem. Fenomena ini menantang paradigma pendidikan politik

konvensional yang masih bertumpu pada asumsi adanya ruang publik yang relatif homogen dan terjangkau oleh strategi pedagogis yang seragam.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam indoktrinasi politik era digital adalah fenomena post-truth politics dan disinformasi terstruktur. Kebenaran faktual sebagai landasan diskursus politik semakin tergantikan oleh narasi emosional dan identitas yang lebih mudah dimanipulasi untuk tujuan indoktrinatif (McIntyre, 2018). Pemerintah dan aktor politik non-negara di berbagai belahan dunia telah mendokumentasikan penggunaan "tentara siber" (cyber troops) untuk menyebarkan propaganda politik, menyerang lawan politik, dan memanipulasi opini publik (Bradshaw & Howard, 2019). Praktik ini menjadi tantangan serius bagi upaya membangun pendidikan politik yang kritis dan berbasis pada pemahaman fakta yang akurat, karena lingkungan informasi yang didominasi oleh disinformasi justru mendorong skeptisisme berlebihan atau bahkan sinisme politik di kalangan warga negara.

Namun demikian, era digital juga menawarkan peluang untuk mengembangkan resistensi terhadap indoktrinasi politik. Platform digital memungkinkan terciptanya komunitas belajar yang lebih inklusif dan beragam, di mana pendidikan politik dapat berlangsung melalui pertukaran ide yang lebih demokratis (Nurjaman, 2025). Gerakan literasi digital yang berkembang di berbagai negara menunjukkan potensi transformatif dari pendekatan pendidikan yang berpusat pada penguatan kapasitas kritis warga dalam menghadapi arus informasi di era digital. Model pendidikan politik semacam ini menekankan pada pemahaman mekanisme kerja media digital dan kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, yang merupakan keterampilan esensial untuk mengembangkan ketahanan terhadap indoktrinasi politik di era post-truth.

Indoktrinasi, Identitas Politik, dan Dampaknya pada Partisipasi Demokratis

Salah satu konsekuensi paling signifikan dari indoktrinasi dalam pendidikan politik adalah dampaknya terhadap pembentukan identitas politik individu dan kelompok. Identitas politik dapat didefinisikan sebagai pemahaman subjektif seseorang tentang dirinya dalam kaitannya dengan kelompok politik tertentu, yang mencakup nilai, keyakinan, dan afiliasi yang membentuk cara mereka memahami dan berinteraksi dalam lingkungan politik (Sulaeman, 2022). Dalam konteks indoktrinasi, identitas politik dibentuk bukan melalui eksplorasi reflektif terhadap berbagai perspektif, melainkan melalui internalisasi narasi dominan yang ditanamkan oleh struktur kekuasaan. Proses ini seringkali menghasilkan identitas politik yang kaku, sulit menerima perbedaan, dan rentan terhadap mobilisasi oleh elit politik untuk tujuan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan demokratis yang lebih luas.

Studi lintas negara menunjukkan korelasi yang kuat antara pendidikan politik yang indoktrinatif dengan tipe partisipasi politik yang cenderung homogen dan mobilisasional, bukan otonom dan deliberatif (Neundorff et al., 2024). Di negara-negara dengan indeks indoktrinasi politik yang tinggi, partisipasi warga negara dalam proses politik cenderung bersifat formal dan ritualistik, seperti kehadiran dalam pemilihan umum atau acara-acara kenegaraan, namun minim dalam bentuk keterlibatan substantif seperti pengawasan kritis

terhadap kebijakan pemerintah atau advokasi berbasis komunitas (Nasoha et al., 2025). Ketimpangan dalam kualitas partisipasi demokratis ini berdampak pada legitimasi sistem politik secara keseluruhan dan menghambat konsolidasi demokrasi yang bermakna.

Dalam konteks Indonesia, pengalaman historis dengan sistem pendidikan politik yang bernuansa indoktrinatif pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah meninggalkan jejak dalam cara generasi yang berbeda memandang peran mereka dalam politik. Studi longitudinal oleh Aspinall & Mietzner (2019) mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam orientasi politik antara generasi yang mengalami pendidikan politik pada masa otoritarianisme dengan generasi yang tumbuh di era reformasi. Generasi yang terpapar pendidikan politik indoktrinatif cenderung menunjukkan tingkat kesadaran politik yang lebih rendah, kepercayaan berlebih pada otoritas, dan kecenderungan untuk melihat demokrasi dari perspektif prosedural semata. Temuan ini menggarisbawahi dampak jangka panjang dari indoktrinasi politik terhadap budaya demokratis suatu masyarakat. Salah satu efek laten dari sistem pendidikan politik yang indoktrinatif adalah melemahnya kapasitas warga negara untuk terlibat dalam diskursus publik yang konstruktif. Ketika sistem pendidikan lebih menekankan pada transmisi keyakinan politik yang seragam daripada pengembangan keterampilan deliberatif, maka masyarakat kehilangan kapasitas vital untuk mengelola konflik dan perbedaan pendapat melalui dialog. Tidak mengherankan jika polarisasi politik menjadi lebih akut di negara-negara dengan sejarah panjang indoktrinasi politik, karena warga negara tidak dibekali dengan keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan mendengarkan perspektif yang berbeda dengan penuh penghargaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam stabilitas dan kohesi sosial yang menjadi prasyarat bagi demokrasi yang sehat.

Menghadapi tantangan indoktrinasi dalam pendidikan politik, perlu dikembangkan paradigma baru yang lebih emansipatoris dan demokratis. Pendekatan pedagogi kritis yang dikembangkan oleh Freire (1970) menawarkan alternatif bagi model pendidikan "banking" yang bersifat indoktrinatif, dengan menekankan pada dialog, refleksi kritis, dan penghargaan terhadap pengalaman subjektif peserta didik. Dalam konteks pendidikan politik, pendekatan ini dapat diterjemahkan menjadi model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menganalisis secara kritis berbagai perspektif politik, mengidentifikasi asumsi dan bias yang mendasarinya, serta mengembangkan posisi politik mereka sendiri melalui proses reflektif dan dialogis (Eka et al., 2026). Implementasi pedagogi kritis dalam pendidikan politik membutuhkan transformasi tidak hanya dalam konten kurikuler, tetapi juga dalam metodologi pembelajaran dan pengembangan kapasitas guru. Studi oleh Desai & Wane, (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan politik yang transformatif sangat bergantung pada keterampilan guru dalam memfasilitasi dialog kritis dan menciptakan ruang aman bagi eksplorasi ide-ide yang beragam dan kadang kontroversial. Oleh karena itu, program pengembangan profesional guru perlu menekankan pada penguatan literasi politik kritis dan kemampuan fasilitatif yang mendukung pembelajaran demokratis, bukan sekadar transmisi pengetahuan politik yang telah ditentukan sebelumnya.

Reformulasi pendidikan politik juga perlu memperhatikan aspek inklusivitas dan keberagaman perspektif. Tradisi pendidikan politik yang indoktrinatif seringkali kali

meminggirkan suara-suara dari kelompok minoritas dan berperspektif Eurocentric atau elite-centric, yang mengabaikan pengalaman dan kontribusi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam perkembangan politik (Banks, 2024). Pendidikan politik yang inklusif perlu mengintegrasikan perspektif yang beragam, termasuk dari kelompok etnis minoritas, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok terpinggirkan lainnya, untuk membentuk pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika kekuasaan dan partisipasi dalam arena politik. Dalam era digital, pendidikan politik perlu mengadopsi pendekatan literasi media kritis yang membekali warga negara dengan keterampilan untuk mengevaluasi informasi dan mengidentifikasi upaya manipulasi politik melalui konten digital. Program literasi media politik yang diimplementasikan di negara-negara Skandinavia dan Baltik telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan resistensi masyarakat terhadap disinformasi politik dan propaganda. Model ini menekankan pada pengembangan kemampuan analitis dalam mengevaluasi sumber informasi, mengidentifikasi bias dalam pemberitaan, dan membangun kesadaran kritis tentang cara kerja algoritma media sosial dalam membentuk lingkungan informasi politik.

Pendidikan politik di era demokrasi digital juga perlu menekankan pada pengembangan kompetensi partisipatif yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara efektif dalam proses-proses politik, baik online maupun offline. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang mekanisme kerja institusi demokratis, keterampilan advokasi dan mobilisasi, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mengejar tujuan politik kolektif. Pendekatan ini menggeser fokus pendidikan politik dari sekadar pengetahuan konstitusional yang abstrak menjadi keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk partisipasi demokratis yang bermakna dalam berbagai konteks, dari tingkat lokal hingga global.

4. KESIMPULAN

Kajian terhadap indoktrinasi dalam pendidikan politik mengungkapkan bahwa praktik tersebut tidak hanya membatasi perkembangan intelektual peserta didik secara individual, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan. Indoktrinasi menghasilkan warga negara yang patuh namun pasif, yang mungkin berpartisipasi dalam ritual-ritual demokratis seperti pemilihan umum, namun kurang mampu menjalankan fungsi pengawasan yang kritis terhadap kekuasaan atau terlibat dalam proses deliberasi publik yang substantif. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengancam vitalitas sistem demokratis yang bergantung pada partisipasi warga negara yang aktif, kritis, dan terinformasi dengan baik.

Transformasi pendidikan politik dari model indoktrinatif menuju model yang lebih emansipatif dan demokratis memerlukan perubahan paradigmatik dalam cara kita memahami tujuan pendidikan politik itu sendiri. Alih-alih memandang pendidikan politik sebagai proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang telah ditentukan sebelumnya, kita perlu memahaminya sebagai proses penguatan kapasitas warga negara untuk memahami, mengevaluasi, dan terlibat dalam diskursus politik secara mandiri dan reflektif. Pergeseran paradigma ini memerlukan reformasi komprehensif yang mencakup

desain kurikulum, metodologi pembelajaran, pendidikan guru, serta lingkungan sekolah dan masyarakat yang mendukung.

REFERENSI

- Acar, O. A., Tuncdogan, A., van Knippenberg, D., & Lakhani, K. R. (2024). Collective creativity and innovation: An interdisciplinary review, integration, and research agenda. *Journal of Management*, 50(6), 2119–2151.
- Ahmmad, M., Shahzad, K., Iqbal, A., & Latif, M. (2025). Trap of social media algorithms: a systematic review of research on filter bubbles, echo chambers, and their impact on youth. *Societies*, 15(11), 301.
- Baihaki, A. (2025). *TRANSFORMASI KURIKULUM PAI DI ERA DIGITAL*. PT Global Teras Fana.
- Banks, J. A. (2024). Educating citizens in diverse societies. In *Intercultural education* (pp. 17–25). Routledge.
- Creswell, J. W. (2021). *A concise introduction to mixed methods research*. SAGE publications.
- Dai, R., Thomas, M. K. E., & Rawolle, S. (2025). The roles of AI and educational leaders in AI-assisted administrative decision-making: a proposed framework for symbiotic collaboration: R. Dai et al. *The Australian Educational Researcher*, 52(2), 1471–1487.
- Desai, S., & Wane, N. (2022). Educating courageously: Transformative pedagogy infusing spirituality in K-12 education for fostering civil society and democracy. *International Journal of Educational Research*, 115, 102017.
- Diharsono, L., & Miwardja, E. J. (2026). Fenomena Filter Bubble dalam Platform E-Commerce: Studi Komunikasi Algoritmik di Shopee Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 856–862.
- Dong, F., & Dong, S. (2023). Research on the optimization of ideological and political education in universities integrating artificial intelligence technology under the guidance of curriculum ideological and political thinking. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing*.
- Eka, E. J., Rijal, S., Yunus, F. M., & IT, S. (2026). PEDAGOGI KRITIS PAULO FREIRE DAN TRANSFORMASI POLITIK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 7(1), 85–97.
- Fauzi, F., Lensa, R., YUSDIANA, E., Safitri, A., Nusraini, I., Novita, W., Isnaini, F., Jufni, M., Yusuf, M., & Sartika, D. (2024). *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Habibah, S. Z. N., Aldjabri, R. H. T., Ayu, N. R., Susilo, G. P., & Hanifan, H. Z. (2025). Perbandingan Pendidikan Politik Partai Golkar dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu 2019 dan 2024. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 6(1), 42–60.
- Hutabarat, Y. V., Sijabat, D. P., & Andini, R. K. (2024). Indoktrinasi Pendidikan Pada Masa Orde Lama: Menanamkan Nilai Pancasila Dan Manipol/Usdek. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(1), 23–32.
- Jaraisy, I., & Agbaria, A. (2026). Educational influence on political culture: Insights from Israel's Arab political elite. *Middle East Critique*, 35(1), 193–214.
- Kalev, L., Hytti, M., Hallik, M., & Sandström, N. (2025). Citizenship Education for Contemporary Democracy: Challenges and Gaps in Six European Countries. *Societies*, 15(12), 355.
- Khaeruddin, K. (2024). TRANSFORMASI PENDIDIKAN ERA ORDE BARU:

- KEBIJAKAN DAN REALITAS PELAKSANAANNYA (1967–1990). *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 6(2).
- Khan, A. (2026). *Education and Extremism: Examining Political Socialization in Pakistani Madrasahs*.
- Leś, T. (2024). Education, Ideology, and Critical Thinking. In *Defending the Value of Education as a Public Good* (pp. 50–65). Routledge.
- Mahardika, D. A., Judijanto, L., Rery, S., Ramadhanita, F. F., Syaputra, D., & Fuadi, M. H. (2025). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Moilanen, A., & Huttunen, R. (2025). Indoctrination and the Aims of Democratic Political Education: Challenges and Answers. *Educational Theory*, 75(5), 823–847.
- Nasoha, A. M. M., Putri, S. A., & Safitri, M. D. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Civic Tech Skills untuk Partisipasi Politik Digital: Citizenship Education in Developing Civic Tech Skills for Digital Political Participation. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 598–612.
- Neundorf, A., Nazrullaeva, E., Northmore-Ball, K., Tertychnaya, K., & Kim, W. (2024). Varieties of indoctrination: The politicization of education and the media around the world. *Perspectives on Politics*, 22(3), 771–798.
- Noviana, V. L. (2026). Dampak polarisasi media sosial terhadap partisipasi politik pemilih muda di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 4(6), 702–709.
- Nurjaman, A. (2025). *Epistemologi Toleransi: Memetakan Etika dalam Lanskap Digital*. Tujuh Pustaka Penerbit.
- Patonia, A. (2025). Green hydrogen and its unspoken challenges for energy justice. *Applied Energy*, 377, 124674.
- Rea, S. C. (2022). Teaching and confronting digital extremism: contexts, challenges and opportunities. *Information and Learning Sciences*, 123(1/2), 7–25.
- Rustandi, A. M., Suhendar, A., & Dalimunthe, M. A. (2024). Polygamy in the Lens of Generation Z: A Communication Psychology Perspective. *KommunikA*, 20(01), 18–25.
- Sahi, Y. (2024). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:(Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik). *JURNAL POLAHI*, 2(3), 80–94.
- Saragih, K. W., Suhendar, A., Damanik, J., Girsang, R. N., Saragi, S. R., & Ningrum, W. C. (2025). Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 208–218.
- Snook, I. A. (2024). Criteria of indoctrination. In *Indoctrination and Education* (pp. 16–45). Routledge.
- Suhendar, A., Dalimunthe, M. A., Chairunnisa, V., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Local government efforts to prevent bullying in learning environments. *Journal of Teaching and Learning Environments*, 1(1), 36–45.
- Suhendar, A., & Saragih, K. W. (2025). THE CONTRIBUTION OF THE FIRST PRINCIPLE OF PANCASILA TO THE FORMATION OF MODERATE RELIGIOUS CHARACTER IN THE DISRUPTION ERA. *Journal Analytica Islamica*, 14(2), 1215–1225.
- Suhendar, A., Saragih, K. W., Bakri, A., & Hikmah, N. (2026). POLARISASI POLITIK DALAM ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN BIBLIOMETRIK ETIKA KOMUNIKASI POLITIK DAN RELEVANSI SIYASAH SYAR'ITYAH. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 25–38.
- Suhendar, A., Syam, A. M., & Ritonga, A. R. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Ruang Motivasi Hijrah Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *KommunikA*, 19(02), 12–20.

- Suhendar, A., Taufika, R., Rachmatsyah, R., Yusuf, R., Fajri, I., Mohd Yusoff, M. Z., & Adawiah, R. (2023). Eco-literacy and sustainable citizenship: The role of the school environment in shaping responsible environmental behavior. *Sekumpul: Journal of Multidisciplinary Education Sciences*, 1(1), 12-19. <https://doi.org/10.62568/jomes.v1i1.13>
- Sulaeman, E. (2022). *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*. Pustaka Al-Kautsar.
- Suprayogi, S., Rahmawati, E., Rafi'uddin, H., & Wiratomo, G. H. (2024). Problematika Antara Internalisasi Dan Indoktrinasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 98-106.
- Taufika, R., Suryadi, K., Darmawan, C., & Mahfudz, A. (2026). Digital populism in political communication research: A systematic literature review and bibliometric analysis (2015-2025). *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 23(1), 370-392.
- Tetteh, P. S., & Edgell, A. B. (2026). Education, indoctrination, and mass mobilization in autocracies. *Political Research Quarterly*, 79(2), 509-527.
- Utamirohmasari, U. (2024). Character education building a generation with integrity and ethics. *IJM (International Journal Multidisciplinary: Economics, Management, Law and Education)*, 1(1), 1-6.
- Weigele, A., & Brandt, C. O. (2022). 'Just keep silent'. Teaching under the control of authoritarian governments: A qualitative study of government schools in Addis Ababa, Ethiopia. *International Journal of Educational Development*, 88, 102497.
- Zeffildaa, G. (2025). *Analisis Keberlanjutan Rezim Totalitarian Korea Utara Dalam Perspektif Hannah Arendt*.
- Zembylas, M. (2022). Rethinking political socialization in schools: The role of 'affective indoctrination.' *Educational Philosophy and Theory*, 54(14), 2480-2491.
- Zhao, W., & Zhang, X. (2025). Fostering tolerance and inclusivity: The transformative impact of ideological and political education on university students. *Journal of the Knowledge Economy*, 16(1), 4575-4604.